



Poltabes-Pemkot gelar razia kependudukan

Oleh Rina Wijayanti
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Kesadaran warga untuk memiliki kelengkapan surat izin tinggal sementara masih sangat rendah.

Hal itu terlihat saat aparat Pemkot Jogja bersama Poltabes Jogja menggelar razia tertib kependudukan, Kamis (26/8).

Kepala Seksi Operasional Dinas Ketertiban Daerah, Pemkot Jogja, Bayu Laksono, saat dikonfirmasi *Harian Jogja*, Kamis (26/8) siang mengatakan, razia cipta kondisi dilakukan guna mendukung pelaksanaan Ramadan. Dalam pekan

ini, dikatakan Bayu, sudah dilakukan sekurangnya empat kali razia. Razia memiliki beberapa fokus yang keseluruhannya bertujuan menciptakan ketertiban daerah.

"Hari ini (Kamis) kami melakukan razia pondokan sesuai dengan PP No.4/2003 tentang Ketertiban Pendirian Pondokan," jelas Bayu. Secara teknis, pelaksanaan diikuti oleh struktur Pemkot Jogja yakni Bagian Binamitra Poltabes Jogja, Satuan Narkoba, Dinas Ketertiban Daerah, Dinas Perizinan, dan BNK Pemkot Jogja.

Dalam razia yang digelar Kamis siang, tim gabung-

an menggelar razia di sekitar wilayah Mergangsan, Gedongtengen dan Ngampilan.

Sebelumnya, petugas gabungan juga melakukan razia di Umbulharjo, Jetis dan Tegalrejo. Hasilnya, petugas menjeri-neri sedikitnya 11 pekerja seks komesial (PSK).

Tiga wanita yang memiliki catatan sudah pernah terjaring razia sebelumnya langsung dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) dan langsung disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja, Kamis siang.

"Dari hasil razia, tiga PSK langsung kami jerat dengan

tipiring dan langsung kami limpahkan ke Pengadilan negeri Kota Jogja untuk disidang, sementara delapan lainnya kami lakukan pembinaan di Panti Sosial Mergangsan. Kami harap dengan pembinaan itu, dapat memberikan pengaruh bagi mereka," terang Bayu.

Pelaksanaan razia, imbuhan Bayu, akan dilakukan secara merata di 14 kecamatan di Kota Jogja.

Untuk razia pondokan, imbuhan Bayu, banyak ditemukan warga yang tinggal di Kota Jogja, namun tidak memiliki surat izin tinggal. Dalam pekan ini, sekurangnya puluhan

orang yang menghuni pondokan ditemukan tidak memiliki surat izin tinggal sementara.

Melalui razia tersebut, Pemkot memberikan pengertian sekaligus peringatan kepada penghuni untuk membuat surat izin tinggal sementara. Untuk pemilik pondokan, petugas juga mengimbau agar mereka memiliki kelengkapan surat usaha.

"Sebagian besar komunitas di Jogja justru didominasi oleh warga luar Jogja. Untuk itu Jogja harus memiliki mekanisme kependudukan yang jelas, penataan dan administrasi yang jelas pula," pungkasnya.

Dihaturkan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005